

Analisis Sistem Pengendalian Internal Melalui Penerapan E-Parking dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Pasar Wae Kesambi Labuan Bajo

Ludgardis Deliman^{1*}, Yohana Cintami Lery²

^{1*} Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia

²Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia

Corresponding Author*

Nama Penulis : Ludgardis Deliman^{1*}
E-mail : luddeliman08@gmail.com

Diterima : 29 Maret 2026
Direvisi : 24 April 2026
Diterbitkan : 30 April 2026

Abstract

The management of parking fees represents a source of Locally-Generated Revenue (PAD) that requires an effective internal control system to ensure transparency, accountability, and the optimization of regional revenue. Conventional parking management faces various challenges, such as manual recording, weak supervision, and the potential for revenue leakage. To address these issues, the West Manggarai Regency Government implemented an Electronic Parking (E-Parking) system at the Wae Kesambi Market in Labuan Bajo. This study aims to analyze the internal control system regarding the implementation of E-Parking for parking fee management at the Wae Kesambi Market, based on the five components of the Internal Control System defined by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) and the Government Internal Control System (SPIP). This study employs a qualitative approach. Data were obtained through observation, in-depth interviews, and document analysis involving the West Manggarai Regency Transportation Agency, parking coordinators, parking attendants, and parking service users. Data analysis utilized the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was verified through source triangulation, technique triangulation, and time triangulation. The research results indicate that the implementation of E-Parking has contributed positively to strengthening the internal control system for parking fee management. Based on the five COSO components, the control environment is supported by a clear division of duties between the Transportation Agency and parking attendants. Risk assessment reveals that the E-Parking system mitigates the risk of transaction manipulation and revenue leakage, although challenges remain regarding internet connectivity issues and the limited operational proficiency of some attendants. Control activities have become more effective through electronic transaction recording, while information and communication processes yield more accurate transaction data accessible in real-time. Furthermore, monitoring has been optimized as all transactions are documented within the system, thereby facilitating evaluation and supervision processes. This study concludes that the implementation of E-Parking strengthens the internal control system by enhancing transparency, accountability, management effectiveness, and the oversight of parking fee collections at Wae Kesambi Market, Labuan Bajo. However, optimizing the E-Parking implementation still requires improvements in human resource competence and technology infrastructure maintenance, as well as public outreach, to ensure the system operates more effectively and sustainably.

Keywords: Internal Control System, E-Parking, Parking Fees, Locally-Generated Revenue, COSO.

Abstrak

Pengelolaan retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memerlukan sistem pengendalian internal yang efektif untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan daerah. Pengelolaan parkir secara konvensional masih menghadapi berbagai kendala, seperti pencatatan manual, lemahnya pengawasan, serta potensi kebocoran penerimaan retribusi. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menerapkan sistem *Electronic Parking* (E-Parking) di Pasar Wae Kesambi Labuan Bajo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian

internal melalui penerapan E-Parking dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Wae Kesambi Labuan Bajo berdasarkan lima komponen Sistem Pengendalian Internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat, koordinator parkir, petugas parkir, serta pengguna jasa parkir. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Parking telah memberikan kontribusi positif terhadap penguatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan retribusi parkir. Berdasarkan lima komponen *COSO*, lingkungan pengendalian telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas antara Dinas Perhubungan dan petugas parkir. Penilaian risiko menunjukkan bahwa sistem E-Parking mampu mengurangi risiko manipulasi transaksi dan kebocoran penerimaan, meskipun masih terdapat kendala berupa gangguan jaringan internet dan keterbatasan kemampuan sebagian petugas dalam mengoperasikan perangkat. Aktivitas pengendalian menjadi lebih efektif melalui pencatatan transaksi secara elektronik, sedangkan informasi dan komunikasi menghasilkan data transaksi yang lebih akurat dan dapat diakses secara *real time*. Selain itu, proses pemantauan menjadi lebih optimal karena seluruh transaksi terdokumentasi dalam sistem sehingga memudahkan proses evaluasi dan pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan E-Parking mampu memperkuat sistem pengendalian internal melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengelolaan, serta pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir di Pasar Wae Kesambi Labuan Bajo. Namun demikian, optimalisasi implementasi E-Parking masih memerlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemeliharaan infrastruktur teknologi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar sistem dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, E-Parking, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, *COSO*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Transformasi digital menjadi salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi hanya dipandang sebagai sarana modernisasi administrasi, tetapi telah menjadi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan *good governance*. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus didorong untuk mengembangkan sistem pelayanan berbasis elektronik agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah diakses, serta meminimalkan berbagai bentuk penyimpangan yang selama ini sering terjadi pada sistem pelayanan konvensional. Digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyediaan informasi yang lebih akurat, real-time, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penguatan sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan teknologi informasi dalam sektor publik telah merambah hampir seluruh bidang pelayanan pemerintah, seperti administrasi kependudukan, perpajakan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan perizinan, pembayaran retribusi, hingga pengelolaan transportasi dan parkir. Salah satu inovasi yang saat ini banyak diterapkan oleh pemerintah daerah adalah sistem *electronic parking (E-Parking)*. Sistem E-Parking merupakan bentuk digitalisasi dalam pengelolaan parkir yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk mencatat transaksi parkir secara otomatis sehingga seluruh transaksi dapat terdokumentasi secara digital. Berbeda dengan sistem konvensional yang masih mengandalkan pencatatan manual dan pembayaran tunai, sistem E-Parking memungkinkan transaksi dilakukan secara elektronik sehingga setiap penerimaan dapat dipantau secara langsung oleh pemerintah daerah. Melalui sistem tersebut,

pemerintah dapat mengetahui jumlah transaksi, nilai penerimaan, waktu transaksi, serta lokasi parkir secara lebih akurat. Kehadiran sistem E-Parking diharapkan mampu mengurangi potensi manipulasi data, meningkatkan transparansi penerimaan retribusi, serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan parkir.

Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi pengelolaan parkir memiliki peran yang sangat penting karena retribusi parkir merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, optimalisasi seluruh sumber PAD, termasuk retribusi parkir, menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Retribusi parkir merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pada daerah yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan tinggi, retribusi parkir memiliki potensi yang besar sebagai sumber penerimaan daerah. Potensi tersebut semakin meningkat pada wilayah yang berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pariwisata. Namun demikian, besarnya potensi penerimaan tidak selalu diikuti oleh optimalisasi realisasi penerimaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual, lemahnya pengawasan terhadap petugas parkir, rendahnya kepatuhan pengguna jasa parkir, praktik parkir liar, hingga adanya potensi kebocoran penerimaan akibat tidak seluruh transaksi tercatat dalam sistem administrasi pemerintah daerah. Permasalahan tersebut menyebabkan target penerimaan retribusi parkir sering kali tidak tercapai sehingga mengurangi kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan retribusi parkir adalah efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal merupakan serangkaian proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam sektor publik Indonesia, sistem pengendalian internal diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP terdiri atas lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Dalam konteks pengelolaan retribusi parkir, sistem pengendalian internal memiliki peranan yang sangat penting karena seluruh proses pemungutan melibatkan transaksi keuangan yang dilakukan secara langsung antara petugas parkir dengan masyarakat. Apabila sistem pengendalian internal tidak berjalan secara efektif, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Sebaliknya, apabila sistem pengendalian internal diterapkan secara

optimal, maka setiap transaksi parkir dapat dipantau, dicatat, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Penerapan sistem E-Parking menjadi salah satu bentuk penguatan pengendalian internal karena mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan, mempercepat proses pelaporan, mempermudah kegiatan monitoring, serta mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan maupun manipulasi data. Dengan demikian, keberhasilan implementasi E-Parking tidak hanya diukur dari peningkatan penerimaan retribusi parkir, tetapi juga dari kemampuannya dalam memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami perkembangan ekonomi cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berkembangnya sektor pariwisata di Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, transportasi, dan investasi. Pertumbuhan tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas kendaraan bermotor, baik kendaraan milik masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan terhadap penyediaan fasilitas parkir semakin meningkat. Oleh karena itu, sektor parkir menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki prospek cukup besar apabila dikelola secara profesional melalui penerapan sistem pengendalian internal yang memadai dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Salah satu lokasi yang memiliki aktivitas parkir cukup tinggi di Kabupaten Manggarai Barat adalah Pasar Wae Kesambi. Pasar ini merupakan pusat perdagangan tradisional yang setiap hari menjadi tempat bertemunya pedagang, pembeli, distributor, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Tingginya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut menyebabkan volume kendaraan yang keluar masuk kawasan pasar juga meningkat. Kondisi tersebut menjadikan retribusi parkir sebagai salah satu sumber penerimaan yang potensial bagi pemerintah daerah. Namun demikian, sebelum diterapkannya sistem E-Parking, pengelolaan parkir di Pasar Wae Kesambi masih dilakukan secara konvensional melalui penggunaan karcis manual dan pencatatan oleh petugas parkir. Sistem tersebut memiliki berbagai kelemahan, antara lain sulitnya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang terjadi, keterbatasan dalam proses rekonsiliasi penerimaan, serta tingginya potensi kebocoran penerimaan akibat transaksi yang tidak tercatat secara optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan serta seluruh anggota organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2022)*, sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan seluruh personel organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai tercapainya tujuan organisasi, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga menjadi bagian dari manajemen risiko yang mampu membantu organisasi dalam menjaga aset, meningkatkan kualitas informasi, dan memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Alam sektor publik Indonesia, sistem pengendalian internal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa SPIP merupakan proses integral yang dilakukan secara terus-

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, SPIP menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan. COSO (2022) mengemukakan lima komponen sistem pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Kelima komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem pengendalian yang efektif. Dalam penelitian ini, kelima komponen tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana penerapan E-Parking mampu memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Wae Kesambi Labuan Bajo.

Electronic Parking (E-Parking)

Electronic Parking (E-Parking) merupakan sistem pengelolaan parkir yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pencatatan, pembayaran, dan pelaporan transaksi parkir secara elektronik. Berbeda dengan sistem parkir konvensional yang masih menggunakan karcis manual dan pembayaran tunai, sistem E-Parking memungkinkan setiap transaksi tercatat secara otomatis melalui perangkat elektronik sehingga menghasilkan data yang lebih akurat, transparan, dan mudah diawasi. Penerapan sistem ini menjadi salah satu bentuk digitalisasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *E-parking* merupakan sistem pengelolaan parkir berbasis teknologi digital yang digunakan untuk mencatat transaksi parkir secara otomatis dan terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam pengelolaan parkir.

Menurut penelitian oleh Andini & Damanik (2024), penerapan *e-parking* mampu meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi parkir, mendukung pencapaian target penerimaan daerah, serta memudahkan proses pencatatan dan pengawasan karena sistem mampu menyediakan data transaksi dan penerimaan parkir secara otomatis, terorganisir, dan *real time*. Selain itu, penelitian oleh Anggraini *et al.* (2023), menunjukkan bahwa penerapan *e-parking* berbasis non-tunai mampu meningkatkan efisiensi serta mengurangi potensi kecurangan dalam transaksi parkir. Penerapan E-Parking memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah daerah, antara lain meningkatkan transparansi penerimaan retribusi, mengurangi potensi kebocoran pendapatan, mempercepat proses pelaporan, serta mempermudah kegiatan monitoring dan evaluasi. Selain itu, penggunaan sistem elektronik juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat karena proses pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan terdokumentasi dengan baik. Dalam konteks penelitian ini, E-Parking dipandang sebagai inovasi teknologi yang berfungsi memperkuat sistem pengendalian internal melalui peningkatan kualitas informasi, pengurangan risiko penyimpangan, serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir.

Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi ini dikenakan kepada masyarakat atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dasar hukum retribusi parkir di Indonesia diatur dalam: (1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Daerah, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan, 2022 yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah; (2). Peraturan daerah yang mengatur pengelolaan parkir dan retribusi parkir di Kabupaten Manggarai Barat mengacu pada Peraturan

Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 2023, yang mengatur mengenai jenis retribusi daerah, objek retribusi, subjek retribusi, serta kewajiban pembayaran retribusi daerah termasuk retribusi parkir. Menurut penelitian oleh Afriana (2024), retribusi parkir memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti kebocoran penerimaan dan lemahnya pengawasan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Wae Kesambi, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan sistem Electronic Parking (E-Parking) dalam pengelolaan retribusi parkir. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi E-Parking, efektivitas sistem pengendalian internal, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi difokuskan pada perbandingan kondisi pengelolaan parkir sebelum penerapan E-Parking (Januari–September 2025) dan sesudah penerapan (Oktober–Desember 2025), sedangkan wawancara dilakukan dengan petugas parkir dan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat sebagai informan yang memahami proses pengelolaan retribusi parkir. Dokumentasi meliputi data penerimaan retribusi parkir, laporan pengelolaan, SOP, peraturan terkait, serta dokumentasi kegiatan di lapangan.

Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi Dinas Perhubungan, laporan pengelolaan parkir, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap penerapan E-Parking dan pengelolaan retribusi parkir. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data secara deskriptif, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian mengenai efektivitas penerapan E-Parking dalam meningkatkan akuntabilitas penerimaan retribusi parkir di Pasar Wae Kesambi.

HASIL DAN DISKUSI

Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Berdasarkan hasil observasi di Pasar Wae Kesambi Labuan Bajo, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan sistem Electronic Parking (E-Parking) sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi parkir. Dalam pelaksanaannya, setiap petugas parkir memiliki pembagian tugas yang jelas, mulai dari pelaksanaan transaksi parkir hingga pelaporan penerimaan retribusi.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa penerapan E-Parking bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir. *"Penerapan E-Parking kami lakukan agar setiap transaksi parkir dapat tercatat dengan baik. Dengan sistem ini kami lebih mudah mengawasi penerimaan retribusi dan mengetahui aktivitas parkir setiap hari."* (Informan 1). Hal senada disampaikan oleh petugas parkir. *"Sekarang kami mempunyai tugas yang lebih jelas karena setiap transaksi langsung dicatat melalui alat E-Parking. Walaupun pada awalnya masih perlu belajar menggunakan perangkat, sekarang sudah mulai terbiasa."* (Informan 2). Berdasarkan observasi, sebagian besar petugas telah melaksanakan tugas sesuai

prosedur operasional yang ditetapkan, meskipun masih ditemukan beberapa petugas yang memerlukan pendampingan dalam penggunaan perangkat elektronik.

Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Sebelum penerapan E-Parking, proses pemungutan retribusi parkir dilakukan secara manual menggunakan karcis sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan maupun kebocoran penerimaan. Informan dari Dinas Perhubungan menjelaskan: *"Sistem manual memiliki banyak keterbatasan karena sulit memastikan jumlah kendaraan yang parkir setiap hari. Dengan E-Parking, semua transaksi langsung tercatat sehingga risiko kehilangan data jauh lebih kecil."* (Informan 1). Sementara itu, petugas parkir mengungkapkan adanya kendala teknis selama implementasi. *"Kalau jaringan internet terganggu, transaksi tetap berjalan, tetapi pencatatan harus dilakukan secara manual terlebih dahulu sampai jaringan kembali normal."* (Informan 2). Hasil observasi menunjukkan bahwa gangguan jaringan internet menjadi kendala yang paling sering ditemui, terutama pada jam operasional yang padat.

Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Berdasarkan hasil observasi, seluruh transaksi parkir dilakukan menggunakan perangkat E-Parking sehingga data kendaraan dan pembayaran tercatat secara otomatis. Petugas parkir menjelaskan: *"Sekarang setiap kendaraan langsung kami input ke alat. Setelah pembayaran selesai, datanya otomatis tersimpan sehingga tidak perlu lagi menghitung karcis satu per satu."* (Informan 2). Pihak Dinas Perhubungan juga menyampaikan: *"Data transaksi dapat langsung dibandingkan dengan laporan penerimaan sehingga apabila terdapat perbedaan, kami dapat segera melakukan pemeriksaan."* (Informan 1). Dokumentasi yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh transaksi parkir telah tersimpan dalam sistem elektronik sebagai dasar penyusunan laporan penerimaan retribusi.

Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Berdasarkan hasil wawancara, sistem E-Parking menghasilkan informasi yang lebih lengkap dibandingkan sistem manual. Data mengenai jumlah kendaraan, waktu transaksi, dan besarnya penerimaan dapat diakses oleh pihak Dinas Perhubungan. Petugas parkir menyatakan: *"Pembuatan laporan sekarang lebih mudah karena semua data sudah tersimpan di sistem."* (Informan 2). Namun demikian, informan dari Dinas Perhubungan mengungkapkan bahwa masih diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. *"Masih ada masyarakat yang belum memahami sistem pembayaran elektronik sehingga kami terus melakukan sosialisasi."* (Informan 1). Berdasarkan observasi, sebagian pengguna parkir masih memerlukan penjelasan mengenai mekanisme pembayaran menggunakan sistem E-Parking.

Pemantauan (*Monitoring*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses monitoring menjadi lebih efektif setelah penerapan E-Parking. Seluruh transaksi yang tercatat dalam sistem dapat dipantau secara langsung oleh Dinas Perhubungan. Menurut informan: *"Setiap hari kami dapat memantau jumlah transaksi dan penerimaan retribusi. Jika ada selisih, kami langsung melakukan pengecekan kepada petugas di lapangan."* (Informan 1). Petugas parkir juga menyampaikan: *"Pengawasan sekarang lebih ketat karena semua transaksi sudah tersimpan dalam sistem."* (Informan 2). Berdasarkan hasil observasi, monitoring tidak hanya dilakukan melalui sistem elektronik, tetapi juga melalui pengawasan langsung di lokasi parkir untuk memastikan seluruh prosedur operasional berjalan sesuai ketentuan.

Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem Electronic Parking (E-Parking) di Pasar Wae Kesambi Labuan Bajo memberikan pengaruh positif terhadap penguatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan retribusi parkir. Sebelum penerapan sistem elektronik, proses pemungutan retribusi masih dilakukan secara manual dengan menggunakan karcis dan pencatatan oleh petugas parkir. Sistem tersebut memiliki berbagai kelemahan, seperti keterbatasan dalam pengawasan transaksi, kesalahan pencatatan, serta potensi kebocoran penerimaan retribusi. Setelah E-Parking diterapkan, seluruh transaksi parkir tercatat secara elektronik sehingga proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan menjadi lebih efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan parkir mampu meningkatkan akuntabilitas penerimaan retribusi melalui penyediaan data yang lebih akurat, transparan, dan terdokumentasi. Temuan penelitian ini sejalan dengan kerangka Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal ditentukan oleh lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dari aspek lingkungan pengendalian, penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan retribusi parkir. Pembagian tanggung jawab tersebut mendukung terciptanya proses kerja yang lebih terarah dan meningkatkan akuntabilitas setiap petugas dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia masih diperlukan, khususnya dalam pengoperasian perangkat E-Parking. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan teknologi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya.

Dari aspek penilaian risiko, implementasi E-Parking terbukti mampu mengurangi berbagai risiko yang sebelumnya sering terjadi pada sistem manual, seperti kesalahan pencatatan transaksi, kehilangan karcis, keterlambatan penyeteroran, dan potensi kebocoran penerimaan retribusi. Digitalisasi transaksi memungkinkan setiap aktivitas parkir tercatat secara otomatis sehingga memudahkan proses verifikasi dan pengawasan. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan munculnya risiko baru berupa gangguan jaringan internet, kerusakan perangkat elektronik, dan keterbatasan kemampuan operator dalam mengoperasikan sistem. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak menghilangkan seluruh risiko, tetapi mengubah karakteristik risiko dari administratif menjadi risiko teknologi yang memerlukan strategi mitigasi melalui pemeliharaan perangkat, penyediaan prosedur darurat, serta peningkatan kapasitas petugas.

Penerapan E-Parking juga memperkuat aktivitas pengendalian dalam pengelolaan retribusi parkir. Seluruh transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik terdokumentasi secara otomatis sehingga memudahkan proses rekonsiliasi antara jumlah kendaraan yang parkir dengan penerimaan retribusi. Kondisi ini meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mengurangi peluang terjadinya manipulasi data maupun penyimpangan penerimaan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Citta et al. (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem parkir mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan meminimalkan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, penerapan E-Parking tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal melalui mekanisme pencatatan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek informasi dan komunikasi, sistem E-Parking menghasilkan informasi yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses dibandingkan sistem manual. Data mengenai jumlah kendaraan, waktu transaksi, dan besarnya penerimaan retribusi tersedia secara elektronik sehingga

mempermudah penyusunan laporan, monitoring, serta pengambilan keputusan oleh Dinas Perhubungan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembayaran elektronik masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif melalui kegiatan sosialisasi menjadi faktor penting agar implementasi E-Parking dapat diterima dengan baik oleh seluruh pengguna jasa parkir.

Selanjutnya, dari aspek pemantauan, penerapan E-Parking memberikan kemudahan bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan monitoring terhadap penerimaan retribusi parkir. Data transaksi yang tersimpan dalam sistem memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih cepat dan akurat, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan dan penerimaan retribusi, proses verifikasi dapat segera dilakukan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berbasis sistem elektronik belum dapat sepenuhnya menggantikan pengawasan langsung di lapangan. Monitoring secara langsung tetap diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur operasional telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta mengantisipasi berbagai kendala teknis yang mungkin terjadi selama operasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Parking di Pasar Wae Kesambi telah berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal dalam pengelolaan retribusi parkir. Sistem elektronik mampu meningkatkan transparansi pencatatan transaksi, mempercepat penyusunan laporan, memperkuat pengawasan, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan retribusi. Namun, keberhasilan implementasi E-Parking masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat perlu melakukan evaluasi secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas jaringan dan perangkat, pelatihan petugas secara berkala, penyempurnaan prosedur operasional, serta sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan E-Parking dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Sistem Pengendalian Internal melalui Penerapan E-Parking dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Pasar Wae Kesambi Labuan Bajo, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *Electronic Parking (E-Parking)* telah memberikan kontribusi positif terhadap penguatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan retribusi parkir. Penerapan sistem ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena setiap transaksi parkir tercatat secara elektronik sehingga memudahkan proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, penggunaan sistem elektronik juga membantu mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang sebelumnya berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan maupun kebocoran penerimaan retribusi.

Berdasarkan analisis terhadap lima komponen Sistem Pengendalian Internal menurut COSO dan SPIP, diketahui bahwa lingkungan pengendalian telah berjalan cukup baik melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara Dinas Perhubungan dan petugas parkir. Pada komponen penilaian risiko, penerapan E-Parking mampu mengurangi risiko manipulasi transaksi dan kebocoran penerimaan, meskipun masih terdapat risiko yang berkaitan dengan gangguan jaringan, kerusakan perangkat, dan keterbatasan kemampuan sebagian petugas.

dalam mengoperasikan sistem. Pada komponen aktivitas pengendalian, penggunaan E-Parking telah memperkuat proses pencatatan dan verifikasi transaksi sehingga data penerimaan menjadi lebih akurat dan mudah ditelusuri. Sementara itu, pada komponen informasi dan komunikasi, sistem menghasilkan informasi transaksi secara *real time* yang mendukung proses pengambilan keputusan dan penyusunan laporan. Selanjutnya, pada komponen pemantauan, sistem E-Parking mempermudah proses monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan retribusi parkir sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan E-Parking tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan bagi petugas parkir, pemeliharaan perangkat dan jaringan secara berkala, serta sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi E-Parking dapat berjalan lebih optimal. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, sistem E-Parking diharapkan mampu mendukung tata kelola pengelolaan retribusi parkir yang lebih transparan, akuntabel, efektif, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, N., Abdullah, N., & Galuh, A. K. (2024). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. 3(1), 264–281. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.1.21>
- Afriana. (2024). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kajian Publik Dan Kemaslahatan). 4(2), 671–678.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2023). *Internal Control—Integrated Framework*. COSO.
- Faradila, C., Pranata, D. A., Arpani, P., & Nasution, R. E. (2024). Efektivitas Kebijakan E-Parking dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Medan. 8, 25713–25718. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16270>
- Gurusi, L., Mansyah, M. S., & Supriyanto, S. (2025). Kebijakan Hukum Pengelolaan Parkir dan Peluang Penerapan E-Parkir: Solusi Mendongkrak Pendapatan Daerah. 8(1), 254–269 <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/11452>
- <https://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/EJPP/article/view/1179>
- Rahayu, Handayani, & F. (2023). Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Melalui Sistem E-Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan.
- Rahman, H. &. (2022). Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. 18(1), 80112. <https://www.researchgate.net/publication/329605302>.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.